

Tambak Udang dan Marginalisasi

Studi Kasus di Jawa Timur

Oleh
Hotman Siahaan

Modernisasi tambak udang di Jawa Timur mengangkat citra pembangunan di wilayah itu. Namun, bagaimana dengan nasib petani yang lebih suka beralih profesi menjadi buruh seusai menjual tanah tambaknya ?

Udang telah menjadi semacam primadona ekspor non migas. Raihan nilai dollar yang dicapainya menggiurkan dan mendorong peningkatan jumlah produksi dari tahun ke tahun. Data Biro Pusat Statistik mencatat dalam periode 1983-1987, kenaikan ekspor hasil perikanan meningkatkan rata-rata sebesar 94,78% per tahun, dan dari jumlah itu sebesar 74,11% diperoleh dari hasil ekspor udang.

jaringan pemasaran yang terkait langsung dengan jaringan pasar global memungkinkan curahan modal besar-besaran di sektor ini. Proses perubahan ini baru berlangsung lebih kurang tiga tahun terakhir. Data BKPM menunjukkan bahwa penanaman modal baik PMDN maupun PMA di bidang sub sektor perikanan yang telah disetujui menunjukkan angka sebagaimana dikemukakan dalam Tabel I.²

TABEL I
BIDANG-BIDANG USAHA SEKTOR PETERNAKAN
YANG DISETUJUI s.d. DESEMBER 1989

Sektor	Jumlah Proyek	PMDN	Jumlah Proyek	PMA
		Nilai (Rp Milyar)		Nilai (US\$ Juta)
1. Budidaya Udang	226	1.505,5	10	66,0
2. Ikan Tuna	34	441,5	5	81,4
3. Penangkapan Udang	11	62,6	9	63,5
4. Budidaya Mutiara	8	7,9	11	18,8
5. Lain-lain	12	3,8	3	13,6
Jumlah	1991	2.051,3	38	233,3

□ Sumber : BPKM, 1989

Peningkatan jumlah ekspor sebesar itu dihasilkan melalui peningkatan luas areal tambak rata-rata sebesar 3,4 % per tahun yaitu dari 225,197 ha pada tahun 1984 menjadi 259.000 ha pada tahun 1987 (menurut perkiraan dari Asian Development Bank, pertambahan areal tambak secara intensif dan semi intensif mencapai 10% per tahun) yang terbesar di 19 propinsi terluas tambaknya adalah Sulawesi Selatan, disusul Jawa Timur, Jawa Barat, DI Aceh dan Jawa Tengah.¹

Kenaikan produksi dan nilai ekspor udang sangat dipengaruhi oleh pengolahan secara intensif tanah tambang. Intensifikasi yang didukung oleh kemampuan teknologi menggantikan posisi tradisional petani dan

Besarnya penanaman modal di dalam budidaya tambak udang ini menunjukkan bahwa intensifikasi budidaya perikanan khususnya udang telah berada di dalam tingkat desa hingga ke jaringan pemasaran internasional di tingkat global. Besarnya minat baik modal dalam negeri maupun modal asing merupakan bukti bahwa peluang yang diperoleh dari budidaya udang pada dasarnya sangat menguntungkan.

Masalah sebenarnya yang segera muncul ke permukaan adalah sejauh mana penetrasi modal besar-besaran tersebut juga melibatkan kehidupan petani di lapisan terbawah yang merupakan mayoritas. Secara tradisional tambak

1 M. Roedhi H.M. *Aspek Sosial Ekonomi Usaha Budidaya Udang Windu (P. Monodon)* : Makalah pada Seminar Eksekutif di Bidang Perikanan : Surabaya, 10

2 Ir. Sanyoto Sastrowardoyo, *Penanaman Modal di Sektor Perikanan di Indonesia*, Seminar Eksekutif Investasi di Bidang Perikanan : Surabaya, 10 Agustus 1989

Banyak muncul kasus pembebasan tanah yang disertai dengan berbagai konflik. Pengambilan hak penguasaan tanah apakah dengan sewa beli atau sewa tahun atau gade adalah proses yang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini di wilayah pedesaan dimana intensifikasi tambak udang sedang berlangsung dengan pesat.

dikelola oleh petani dengan mengandalkan kekuatan alam dan dengan segala keterbatasan teknologinya. Di dalam lima tahun terakhir, proses besar-besaran pengelolaan budidaya tambak udang secara modern telah menimbulkan perubahan yang besar pula dalam kehidupan petani tradisional.

Makalah ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk melihat sejauh manakah proses perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan di daerah pedesaan dalam hubungannya dengan masalah pertanian akibat modal dan teknologi modern di sektor pertanian. Khususnya yang menyangkut hubungan-hubungan sosial yang berubah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat petani di daerah pedesaan di wilayah Jawa Timur yang menempati urutan kedua yang memiliki areal tambak udang terbesar sesudah Sulawesi Selatan.³

Masalahnya kemudian adalah: sejauh manakah pengaruh penetrasi modal dan teknologi modern dalam budidaya tambak udang menimbulkan dampak sosial-ekonomis dalam kehidupan petani tradisional di daerah pedesaan?

TAMBAK UDANG DI JAWA TIMUR

Luas daratan Jawa Timur meliputi 47.922,42 Km². Dari wilayah seluas itu sebesar 897,00 Km² merupakan tanah tambak, sedangkan tambak meliputi 5.903,55 km². wilayah tambak membentang di pantai utara mulai dari Kabupaten Tuban hingga Banyuwangi.

Secara tradisional, tambak di Jawa Timur lebih ditujukan pada pemeliharaan ikan bandeng dan udang dalam jumlah yang tidak terlalu besar yang dikelola secara tradisional dengan mengandalkan benih

(benur) yang masuk secara alami dari laut. Petani membangun petakan-petakan yang dibangun di tepi pantai atau muara sungai yang membentuk genangan-genangan air untuk manampung berbagai jenis ikan atau larva yang terbawa arus pasang yang kemudian membesar di dalamnya. Secara alamiah, udang sebenarnya merupakan hasil ikutan.

Upaya peningkatan tambak udang dan bandeng secara campuran baru dimulai sejak tahun 1875 dengan dukungan fasilitas kredit IBRD (International Bank For Reconstruction Development) bank dunia yang dilanjutkan kemudian pada tahun 1979 dengan pemberian fasilitas kredit dari RCP (Rural Credit Project) bank dunia.

Namun kisah sukses budidaya tambak udang di Jawa Timur melalui pola intensif baru dimulai pada tahun 1986 atas nama seorang pengusaha yang memiliki PT Mutiara Blambangan Permai di desa Sumber Beras, Muncar Banyuwangi. Uji coba budidaya tambak udang secara intensif dilakukan di atas tanah seluas 1,25 Ha. Di tebari benur sebanyak 100.000 ekor selama 3-4 bulan ternyata mampu menghasilkan udang sebanyak 2,5 ton.⁴

Kisah sukses pengusaha di Banyuwangi ini telah merembes dan merangsang banyak petani kaya di wilayah lain, terutama para pengusaha penggilingan padi untuk menanamkan modalnya dalam budidaya udang secara tunggal. Penyeberangan dengan cepat ke wilayah Situbondo, Jember, Probolinggo dan lain-lain. Hingga tahun 1989, luas areal tambak potensi udang di Jawa Timur tercatat seluas 54.000 ha

3 M. Roedhi H.M., Loc. Cit.

4 "Perkembangan Industri Udang di Jawa Timur, Permasalahan dan Upaya Penanggulangannya", *Informasi Perikanan 1988/1989* (Dinas Perikanan Tk Jawa Timur)

dimana 65% dari luas itu terdapat di Kabupaten Gresik, Kodya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan. Adapun luas tambak udang di Jawa Tmur digamnbarkan sebagaimana dikemukakan di dalam Tabel 2, dimana hampir seluruh kabupaten di pantai utara memiliki wilayah tempat yang dikelola dengan budidaya udang bahkan wliayah Pantai Madura merupakan areal tambak yang potensial.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa wilayah dengan areal tambak terluas hampir semua berada di pesisir Pantai Utara, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo ,hingga Banyuwangi. Pantai Utara memilki areal tambak yang potensial, meski secara tradisional masih belum tergarap.

Terdapat seluas 4.069,035 Ha lahan tambak yang dikuasai oleh hanya sekitar 290 orang baik perorangan ataupun badan

TABEL II
JUMLAH LUAS TAMBAK MENURUT
LUAS KOTOR/LUAS BERSIH
DI JAWA TIMUR, 1987

Daerah Tk II	Luas Kotor (Ha)	Luas Bersih (Ha)
Tuban	470	394
Lamongan	1.127	1.012
Gresik	16.879	15.022
Surabaya	5.815	5.059
Bangkalan	2.400	2.047
Sampang	2.316	1.852,8
Pamekasan	698	1.608
Sumenep	346,6	340,3
Sidoarjo	14.618	12.622
Pasuruan	3.748	3.560
Probolinggo	1.401,7	1.261,5
Situbondo	660,9	577,9
Banyuwangi	1.956,9	1.760,8
Jember	8,0	7,2
Jumlah	52.442,1	46.124,5

Sumber: Roedhi H.M. Aspek Sosial Ekonomi, Usaha Budidaya Udang Windu (P. Monodon). Secara Intensif (Makalah dalam Seminar Majalah Eksekutif Surabaya, 1989)

TABEL III
JUMLAH PENGUSAHA DAN LUAS PEN-
GELOLAAN TAMBAK POLA MAJU
PER KAB. DI JAWA TIMUR, 1987

Daerah Tk II	Pengusaha (Perorangan)	Luas (Ha)
Tuban	31	291,572
Lamongan	1	2,155
Gresik	8	19,849
Surabaya	1	60,000
Bangkalan	3	95,000
Sampang	1	21,000
Lumajang	6	150,000
Malang	6	79,000
Sidoarjo	2	31,940
Pasuruan	11	168,040
Probolinggo	56	717,818
Situbondo	91	1.204,750
Banyuwangi	55	770,302
Jember	18	456,909
Jumlah	290	4.069,035

Sumber: Dinas Perikanan Jawa Timur, 1989

hukum yang memungkinkan mengelola tambak secara intensif dengan adanya Surat Ijin Operasional (SIUP), yang dikeluarkan oleh pemerintah daaerah.

Data dari sumber yang sama juga mengemukakan berdasarkan inventarisasi keseluruhan, pengusahaan lahan tambak intensif di 17 kabupaten Jawa Timur baik yang belum dapat rekomendasi maupun yang sudah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah tingkat II, tercatat seluas 6,731,000 Ha. Perlusaan areal tambak udang tidak hanya di wilayah-wilayah tradisional di Pantai Utara, tetapi juga meluas hingga ke wilayah Pantai Selatan, yang secara geografis tidak memungkinkan membangun lahan tambak secara tradisional. Namun teknologi telah memungkinkan mengubah wilayah-wilayah perkebunan kelapa, sawah maupun ladang di Pantai Selatan menjadi tambak udang dengan, menggunakan pompa-pompa air modern. Tercatat sejumlah kurang lebih 6.251

Ha areal di Pantai selatan secara teknis dapat digunakann sebagai areal tambak udang yang meliputi wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan.

Eksisitensi areal tambak udang terasa makin meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Angka perolehan produksi juga meningkat dari tahun ke tahun dalam

adalah industri yang pada hakekatnya mencakup ruang lingkup serta mata rantai yang panjang itu. Ketergantungan antara jalur lokal hingga jalur global.

Sejauh mana proses perubahan sosial yang melanda kehidupan petani tambak di daerah pedesaan membawa perubahan dalam tata kehidupan ekonomi khususnya sumber data tanah dalam kehidupan masyarakat desa, adalah merupakan soal besar

TABEL 4
KENAIKAN PRODUKSI DAN NILAI EKSPOR UDANG JAWA TIMUR

Tahun	Produksi (Ton)	Eksport (Ton)	Nilai US\$
1984	35.926,40	2.887,30	26.044.656,10
1985	38.191,30	3.548,40	30.416.819,76
1986	41.859,70	5.964,00	58.957.888,56
1987	44.140,90	7.500,40	69.939.421,25
1988	51.293,00	12.786,40	121.162.713,37

Sumber : Dinas perikanan TK.I Jawa Tomur, 1989.

kurun waktu lima tahun tersebut sebagaimana tercatat dan dikemukakan dalam Tabel 4 berikut bahwa baik besarnya produksi maupun besarnya nilai raihan dolar dari hasil ekspor komoditi non migas ini meningkat secara meyakinkan.

Realitas sosial apakah sebenarnya yang terdapat dibalik besarnya angka-angka di atas ? Bahwa penetrasi modal besar dalam modernisasi areal tambak demi mengembangkan komoditi yanag bernilai ekspor sangat tinggi menuntut proses intensifikasi yang tinggi pula. Makna dari intensifikasi tambak adalah ketergantungan yang sangat besar dari mata rantai yang panjang sejak pengadaan benur, pengadaan lahan, penyediaan makan, obat-obatan, pompa air, panen, penyimpanan serta pengepakan di pabrik pendingin (cold trorage) hingga pengiriman ke luar negeri. Ketergantungan pada mata rantai yang panjang sedemikian hanya merupakan kisah sukses dari investasi besar-besaran dalam pengelolaan budidaya udang, yang hampir-hampir tidak dapat diraih oleh para petani tambak tradisional. Intensifikasi tambak udang

yang dihadapi oleh masyarakat desa itu sendiri. Berbagai kasus menunjukkan bagaimana para petambak tradisional tersebut terpojok ke dalam situasi delematis, antara meningkatkan hasil dengan kemampuan yang rendah secara teknologis atau memilih untuk melepaskan ketergantungan mereka pada tanah dengan pilihan kaum buruh di atas tanah lahan mereka. Proses perubahan ini dalam banyak kasus telah menimbulkan marginalisasi sebagian besar petani tambak tradisional yang memiliki luas lahan di bawah margin.

Banyak muncul kasus pembebasan tanah yang disertai dengan berbagai konflik. Pengambilan hak penguasaan tanah apakah dengan sewa beli atau sewa tahun atau gade adalah proses yang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini di wilayah pedesaan dimana intensifikasi tambak udang sedang berlangsung dengan pesat. Di wilayah Kabupaten Gresik, wilayah yang secara tradisional merupakan areal tambak, dalam suatu pengamatan menunjukkan bahwa pada tahun 1983 telah terjadi pergeseran yang cukup meyakinkan

dari usaha budidaya tradisional padi sawah menjadi areal tambak dengan budidaya udang. Proses pengalihan usaha tersebut disertai pula dengan proses pengalihan

TANAH TAMBAK UDANG: DILEMA MODERNISASI PERTANIAN ?

Intensifikasi tambak adalah modernisasi dalam pengertian yang lebih luas. Bahwa di

TABEL 5
LUAS AREAL TAMBAK DAN PERKEMBANGAN LUASNYA DI KABUPATEN GRESIK 1983
(Dalam Ha.)

Kecamatan	A	B	C	D
1. Duduk Sampean	4.468	2.258,5	2.750,5	1.987
2. Cermai	4.438	570,5	1.950,5	1.063
3. Kebomas	475	370	-	94
4. Manyar	2.219	4.470,2	1.015	311
5. Bungah	1.950	3.200,3	200	570
6. Sedayu	1.536	1.862,1	75	439
7. Ujung Pangkah	1.060	3.356,5	100	157
Jumlah	16.164	16.097,1	6.091	5.121

Ket: A. Luas baku Sawah

B. Luas Baku Tambak ("Tambak Asin")

C. Luas Tambak Tawar

D. Perluasan Sawah yang dirubah jadi tambak

SUMBER : Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Tk.I Jatim Gresik 1983.

penguasaan atas tanah.

Proses pengalihan fungsi tanah secara tradisional menjadi areal tambak udang dengan penggunaan teknologi canggih membawa dampaknya yang tidak kecil bagi kehidupan petani miskin. Margin tambak udang membutuhkan areal lahan yang tidak kecil. Luas areal mana yang tidak dapat disediakan oleh banyak petani tradisional yang telah mengalami fragmentasi tanah. Sebuah laporan Dinas Perikanan Tingkat I Jawa Timur mengemukakan:

Disamping itu dibalik keberhasilan yang telah dicapai perlu diwaspadai adanya beberapa permasalahan yang ditimbulkan antara lain berita tentang konflik lahan kawasan Pantai Utara antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain, antara pengusaha dengan masyarakat setempat ataupun instansi yang satu dengan yang lain. Demikian pula dengan timbulnya kasus-kasus kerusakan lingkungan antara lain berita kerusakan hutan bakau, rembesan air laut yang menyebabkan asinnya sumur penduduk ataupun matinya tanaman padi, berkurangnya air sumur penduduk karena penggunaan air tanah dan lain sebagainya.⁵

5. Ibid

dalam proses modernisasi tersebut berlaku apa yang banyak ahli dinamakan pendekatan Betting on the strong sungguh merupakan wujudnya. Program intensifikasi pertanian yang hanya mampu bekerja dengan petani kaya serta responsif.⁶ Intensifikasi tambak udang telah banyak merubah banyak tata sosial hubungan ekonomis serta kultural para petani tradisional. Munculnya komersialisasi dalam pengambilan keputusan terutama dalam bidang produksi yang terjadi karena pengaruh penggunaan sarana produksi yang harus dibeli diluar desa bahkan luar negara. Komersialisasi itu muncul bukan dari hubungan harga, melainkan dari kenaikan hasil-hasilnya yang besar sekali.⁷ Kenaikan ini menyebabkan surplus yang besar bagi pemilik tanah luas. Para pengusaha tambak kaya dengan kelebihan

⁶ Rex Mortimar, *Strategies of Rural Development in Indonesia; Paasant Mobilisation Versus Technology Stimulation*, (SEADAG), New York, 1975

⁷ Ibid

surplus yang diperoleh dari hasil nilai komoditi udang telah mengumpulkan sebagian besar tanah di tangan mereka dan kemampuan yang lebih besar lagi untuk mengelola tambak secara intensif untuk memperbesar surplus mereka.

Sampai dengan tahun 1988, tercatat sebanyak 356 pengusaha perorangan badan hukum yang membuka lahan tambak di 17 kabupaten yang meliputi seluas kurang 6.037,361 Ha⁸ yang dikelola secara intensif apabila dirata-rata, jumlah pemilik pen-



Para pengusaha tambak kaya dengan kelebihan surplus yang diperolehnya telah mengumpulkan sebagian besar tanah di tangan mereka

guasa tambak dengan luas lahan yang tersedia tersebut, diperhitungkan rata-rata pemilikan / penguasaan tanah meluas 16,96 ha per-orang/badan usaha. Jumlah pemilik/ pengusaha dan luas menunjukkan betapa pemilikan tanah tambak bukanlah usaha pengolahan tanah yang kecil.

Sebuah studi pengamatan awal dari sebuah desa di Kecamatan Bangil Pasuruan yang merupakan salah satu wilayah KUD Mina terbaik di Jawa Timur menunjukkan bahwa luas lahan merupakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi

TABEL 6
JUMLAH RTP TAMBAK MENURUT BESARNYA USAHA
DI DAERAH TINGKAT II JAWA TIMUR

Daerah Tk. II	Jumlah RTP Tambak	Kategori Besarnya Usaha			
		< 2 Ha	2-5 Ha	5-10 Ha	> 10 Ha
1. Tuban	192	192	-	-	-
2. Lamongan	354	31	52	96	175
3. Gresik	5.411	-	1.427	3.870	114
4. Kodya Surabaya	2.265	569	1.435	243	18
5. Bangkalan	1.530	1.220	260	50	-
6. Sampang	516	292	195	10	19
7. Pamekasan	288	136	115	34	3
8. Sumenep	402	402	-	-	-
9. Sidoarjo	2.890	-	-	1.900	990
10. Pasuruan	1.338	367	551	241	79
11. Probolinggo	628	332	241	54	1
12. Situbondo	330	231	66	24	9
13. Banyuwangi	179	47	46	39	49
14. Jember	13	2	3	8	-
Jumlah	16.236	3.821	4.391	6.569	1.455

SUMBER : M. Roedhi H. M. 1989.

8 M. Roedhi, Loc. Cit

udang yang menguntungkan dengan pengolahan semi intensif, dibutuhkan seluas 3 Ha, sementara apabila dikelola secara intensif, untuk hasil yang sama dibutuhkan lahan seluas 1 Ha. Dengan kata lain, perbandingan antara pengelolaan semi intensif dengan intensif dengan hasil yang dicapai adalah 1:3. Berapa besar luas lahan yang dimiliki/dikuasi oleh para petambak udang di Jawa Timur dapat dikemukakan dalam tabel⁹

Pada Tabel 6 dapat diinterpretasikan bahwa di beberapa wilayah di Jawa Timur perluasan lahan tambak udang didominasi oleh pengusaha swasta yang berasal dari luar desa, dengan luas rata-rata 5-10 Ha. karena golongan ini merupakan pengusaha pemilik SIUPP yang hanya diberikan kepada badan usaha yang akan mengelola budidaya udang dengan Peraturan Pemerintah Daerah. Kenyataan ini juga berarti bahwa telah terjadi semacam ancaman pengalihan hak penguasaan lahan dari petani pemilik tradisional ke tangan penguasa dengan modal-modal besar yang datang dari luar desa. Sebuah studi kasus di Desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa desa tersebut. Luas lahan tambak meliputi 1200 Ha, yang secara tradisional dimiliki petani setempat. Namun dalam lima tahun terakhir, dengan kedatangan pemilik modal dari Surabaya, bahkan dari Jakarta, lahan tambak yang ada tersebut pada tahun 1989 hanya tinggal 19% yang dimiliki oleh petani setempat. Sebagaimana tercatat pengakuan seorang penduduk desa Kalianyar:

Demam udang di desa ini terjadi pada tahun 1984/1985 dengan kenaikan harga udang banyak pemilik modal datang dari Jakarta, Surabaya menanamkan modalnya di tambak udang desa ini, baik

⁹ Ibid

Penguasaan lahan tambak guna meningkatkan komoditi udang yang bernilai ekspor tinggi tersebut terakumulasi pada selapisan tertentu masyarakat yang memiliki modal besar.

dengan sewa kontrak jangka panjang 5-10 tahun ataupun dengan sistem bagi hasil maro. Tapi lebih banyak lagi dengan jual bebas. Harga jual tanah kelas I pada tahun itu 20 juta/ha. Tanah kelas II 10-12,5 juta/ha dan kelas III dsibawah 10 juta/ha.¹⁰

Desa Kalianyar adalah salah satu dari 3 desa yang merupakan wilayah kerja Koperasi Tani Tambak Kalirejo di Kabupaten Pasuruan salah satu dari sedikit koperasi tani yang mampu bertahan untuk menghimpun petani tambak non intensif dan semi intensif. Pada tahun 1978 Koperasi Tani Tambak Kalirejo mengelola lahan tambak udang seluas 500 ha.¹¹ Namun pemberian modal luar adalah merupakan tantangan bagi koperasi dengan pengelolaan

semi intensif ini, ketika banyak dari petani tambak tradisional di wilayah kerjanya mengalihkan lahan tambak mereka dengan pemilik modal luar desa.

Pemerintah pada dasarnya telah mencoba melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kehidupan para petani pedesaan dengan melakukan Program Intensifikasi Tambak (IN-

TAM) melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No,05/Sk/Mentan/Bimas/VI/1984. Menurut keterangan SK ini, peserta INTAM adalah para pemilik tambak yang mengelola tambak milik sendiri, dan atau penggarap tambak untuk mengelola tambak miliknya, dan para petani pemilik atau penggarap, penyewa, penyakap yang diberi kuasa oleh pemilik tambak yang mengusahakan budidaya tambak tersebut yang bersedia menerapkan teknologi Sapta Usaha Pertambakan.

¹⁰ Wawancara dengan seorang Petani Tambak di desa Kalianyar Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, 1990

¹¹ Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 1988, Koperasi Tani Tambak Kalirejo, Bangil Pasuruan

Tujuan utama proyek INTAM adalah memberi modal kepada petani tambak tradisional agar dapat meningkatkan pengelolaan tambak secara intensif. Di Jawa Timur, berdasarkan SK Gubernur No. 41 Tahun 1986, proyeksi areal INTAM musim tanam 1986/1987 adalah seluas 2.435 Ha yang meliputi wilayah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Surabaya. Namun kenyataan menunjukkan lain. Realisasi INTAM kredit untuk para petani tersebut hanya mampu direalisasikan seluas 34 Ha dengan jumlah peserta 17 orang, sementara itu, realisasi INTAM swadana (usaha perorangan atau badan hukum) meliputi 3.346,853 Ha dengan jumlah pemilik 626 orang pada tahun 1986/1987.¹² Kenyataan ini merupakan bukti yang lain bahwa penguasaan lahan tambak guna meningkatkan komoditi udang yang bernilai ekspor tinggi tersebut terakumulasi pada lapisan tertentu masyarakat yang memiliki modal besar. Disamping proyek INTAM, pemerintah juga mengeluarkan SK Menteri Pertanian No:334/KPTS/IK.210/6/1986 tanggal 4 Juni tentang Pola Tambak Inti Rakyat (TIR). Hakekat pola TIR adalah untuk menjaga membesarnya disparitas antar petambak kecil tradisional dengan pengusaha tambak besar. Menurut pola TIR, untuk daerah Pulau Jawa setiap perusahaan hanya terbatas pada perusahaan pengoperasian lahan tambak seluas 30 Ha. Setiap kelebihan luas tersebut dapat dikelola sebagai inti (40%) sedangkan yang 60% harus dibagikan kepada petani tambak sebagai plasma. Namun di dalam kenyataannya, hampir tidak ada satupun dari ratusan pengusaha tersebut yang bersedia menerapkan TIR. Sebagaimana ditulis dalam laporan dinas Perikanan TK I Jatim.¹³

"kenyataan di bidang lapangan menunjukkan bahwa masih sedikit sekali pengusaha yang berminat mencoba menerapkan pola TIR tersebut, bahkan tidak jarang atau

Perusahaan dikembangkan menjadi beberapa perusahaan baru untuk menguasai/mengoperasikan luas lahan tambak melebihi 30 Ha". Sampai dengan tahun 1989, hanya tercatat 2 pengusaha yang sedang dalam tahap rintisan penerapan pola TIR yaitu sebuah perusahaan bernama Pt Sari tani Pemuka di kabupaten Banyuwangi dengan lahan tahap pertama seluas 55 ha, dan akan dikembangkan men-

Masa panen udang adalah masa munculnya kasus pertengkaran di desa-desa tambak. Itulah sebabnya dalam beberapa tahun terakhir, para pemilik atau pengelola tambak terpaksa menggunakan aparat keamanan di dalam mengamankan hasil panen dari serbuan masyarakat sekitar yang disebut golongan Mburi atau golongan penggoler yang mengambil sisa-sisa panen.

jadi seluas 200 Ha. yang lain adalah Pt. Candra Satwikanuasa di Kotamadya Surabaya yang mengelola lahan seluas 60 Ha.

KONFLIK KEPENTINGAN TANAH

Ekspor non migas telah menjadi semacam perintah dewa bagi banyak pihak. dan perintah semacam itu telah melahirkan banyak perubahan sosial dalam hubungan peran di dalam kehidupan masyarakat. Kepentingan atas tanah adalah kepentingan bagi banyak orang dengan segala dimensinya. Modernisasi pengelolaan tanah khususnya tanah tambak melalui intensifikasi telah merubah banyak wajah hubungan pertanian baik antara petani tambak tradisional yang miskin maupun pemilik modal yang mengubah fungsi tanah dengan pengolahan yang intensif.

Pengolahan tambak secara intensif membutuhkan peralatan teknologi canggih. Jaringan sarana produksi yang berskala

¹² Dinas Perikanan Jatim, Op. cit.

¹³ Ibid

luas. penyediaan pompa air misalnya telah menimbulkan banyak permasalahan atas fungsi dan tata guna tanah bagi kepentingan orang banyak. tambak udang membutuhkan air tawar demi pengendalian kualitas air yang umumnya diperoleh demi melalui pengeboran air tanah. Wilayah tambak yang berada di tengah-tengah komunitas desa telah menimbulkan soal besar bagi penyediaan air bersih yang cukup. banyak kasus di Jawa Timur muncul karena rembesan air tambak memecari sumur-sumur penduduk dan mematikan tanaman padi. Di samping itu menurut laporan sementara pers, hutan bakau di Jawa Timur telah berkurang dengan drastis dalam lima tahun terakhir ini mendekati angka 50% konflik kepentingan kultur atas tanah juga semakin mencuat.

Pengelolaan tambak udang secara intensif lebih merupakan sebuah *enslave* di tengah-tengah kehidupan komunitas desa tradisional yang miskin. tambak pada umumnya dipagar secara tertutup. Disinari lampu terang benderang yang melahirkan citra eksklusif ditengah-tengah kemiskinan desa. Konflik kepentingan dalam hubungan sosial ekonomis desa tradisional mudah terjadi, ketika hubungan antara pengelola tambak intensif dengan komunitas pertanian yang berakar dalam tatanan moral ekonomis subsistensi mereka, menuntut redistribusi dari hasil panen atas tanah di wilayah komunitas tersebut. Berhadapan dipihak lain dengan kepentingan operasional bagi pengelolaan tambak. Masa panen udang adalah masa munculnya kasus pertengkaran di desa-desa tambak. Itulah sebabnya dalam beberapa tahun terakhir,

Lebih dari itu, masalah pertanahan dalam tambak udang ini juga merupakan bukti kebenaran teoritis yang oleh banyak ahli disebut dengan the theory of uneven Development yang menyatakan bahwa hukum perkembangan yang tidak seimbang bukan saja menghasilkan distribusi kekayaan antar kelas, akan tetapi juga menyemaikan ketimpangan spasial antara wilayah.

para pemilik atau pengelola tambak terpaksa menggunakan aparatur keamanan di dalam mengamankan hasil panen dari serbuan masyarakat sekitar yang disebut golongan Mburi atau golongan penggoler yang mengambil sisa-sisa panen. Khusus manipulasi tanah juga semakin santer terjadi, sebagaimana terjadi diberbagai wilayah, dimana penjualan secara gelap tanah tambak kepada para investor yang berasal dari luar desa, sebagaimana banyak diungkapkan oleh media massa.¹⁴

Dengan kata lain telah muncul satu realitas memburuknya hubungan kelas agraris¹⁵. Di dalam kehidupan komunitas petani

tradisional dengan pengelola tambak modern. Penjelasan mengenai kehidupan ini bisa dicari dalam satu gabungan serta faktor-faktor demografis dan politis yang terus menerus merongrong kemampuan menawar yang relatif dari petani miskin. Munculnya pasar serta sistem pembayaran kontan berarti kegoncangan baru dalam pendapatan petani tersebut. Pada saat yang sama, desakan-desakan untuk membagi kembali ke lingkungan desa menjadi bentuk kelangsungan hidup yang semakin tidak dapat dipercaya, karena semakin banyak tanah yang tertinggal di desa yang biasa mengabaikan norma-norma setempat tanpa menerima hukuman apa-apa.

PENUTUP

Program intensifikasi tanah tambak dalam banyak hal adalah merupakan tambahan bukti bahwa upaya modernisasi

¹⁴ *Diduga Jual Tambak Kiai, Dua Belas Orang Diperiksa*, Surabaya Post, 2 Januari 1990.

¹⁵ James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani, Pergerakan dan Substansi di Asia Tenggara*, LP3ES Jakarta 1981

pedesaan tidak selalu identik dengan peningkatan taraf kehidupan masyarakat desa. kasus tambak udang di Jawa Timur dalam banyak hal membuktikan bahwa meskipun pada kenyataannya proses modernisasi dalam pengelolaan tanah atau tambak telah memberikan mamfaat yang banyak dalam peningkatan devisa, namun apakah suksese dibalik kenaikan devisa tersebut mengangkat juga kehidupan petani miskin belum dapat dijadikan jaminan. sampai dengan tahun 1986 penghasilan nelayan dan petani rata-rata Rp.110,389, dan Rp.342,223, meskipun penghasilan nelayan dan petani meningkat masing-masing 20,70% dan 60,00% dibanding tahun sebelumnya, tetapi masyarakat nelayan tradisional masih tergolong kurang beruntung oleh karena penghasilannya belum menutup kehidupan fisik minimum yaitu sebesar Rp. 172,903, demikian antara lain pidato Gubernur TK I Jatim

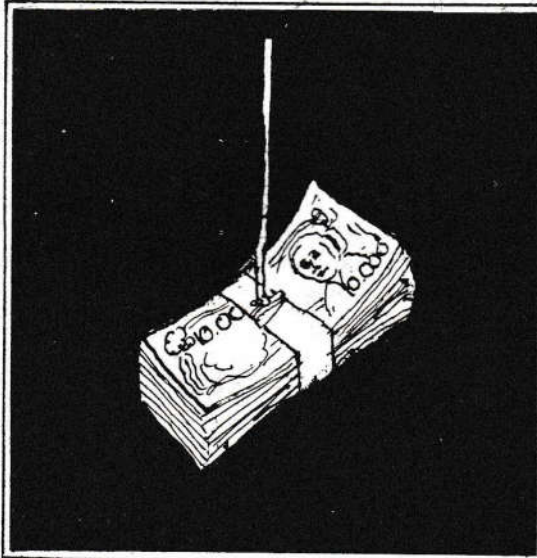
dalam pertrtemuan dengan para pembina nelayan dan petani dan petani ikan se Jatim.¹⁶

Lebih dari itu, masalah pertanahan dalam tambak udang ini juga merupakan bukti kebenaran teoritis yang oleh banyak ahli disebut dengan the theory of uneven Development yang menyatakan bahwa hukum perkembangan yang tidak seimbang bukan saja menghasilkan distribusi kekayaan antar kelas, akan tetapi juga menyemaikan ketimpangan spasial antara wilayah.

Daerah pinggiran cenderung hanya tumbuh sebagai ekonomi ekspor yang ber-

fungsi melayani permintaan bahan-bahan mentah para kapitalis metropolitan. dalam pada itu perkembangan- perkembangan di dalam tehnologi produksi-produksi baru yang terus menerus terjadi di daerah pusat senantiasa cenderung menciptakan fluktuasi dan guncangan-guncangan para ekonomi daerah pinggiran, justru oleh karena sifat ekonomi yang beroreintasi ekspor tersebut.¹⁷

Barangkali keberanan teori demikian ini dapat dilihat dalam kasus komoditi udang ini. Intensifikasi udang hanya terjadi



dengan dukungan mata rantai sarana produksi, misalnya industri pakan udang yang di Jatim ada 6 buah, meski hingga kini pakan udang masih harus import dari Taiwan. balai pembenihan udang yang ada meliputi 57 buah tersebar dari kabupaten Banyuwangi, lamongan, Probolinggo, Situbondo, dan Tuban. Seluruh industri ini merupakan pendu-

kung dalam rangkaiannya dengan jalur global demi peningkatan komoditi ekspor non migas udang yang semakin meninggi.

Dengan rumusan lain, fungsi produksi tanah telah menjadi alat yang digunakan untuk membuka jalur hubungan ketergantungan antar masyarakat pinggiran(baca desa) dengan masyarakat pusat (baca, Kota) di negara-negara periferi demi menciptakan harmonisasi hubungan dengan negara centrum sebagaimana dikemukakan oleh John Galtung¹⁸ bahwa harus terdapat disharmonisasi antar fereferi dari fereferi

17 Lihat.... Dr. Nasukin, *Dinamika Masyarakat Desa dalam Perspektif, (Dilema)*, Edisi ke 4 No 4 Desember 1988

18 Johan Galtung, A. *Structural Theory of Imperialism*, Journal of Peace Research, Vol 8 No 2 1975

16 Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur pada Pertemuan Pembinaan Nelayan dan Petani Ikan se Jatim, 25 Janu 1987

dengan fereferi dari centrum, tetapi hubungan semacasm itu maka tata hubungan ketergantungan akan semakin besar.

Ketergantungan hasil produksi tanah tambak dengan jalur global dengan dukungan industri penunjang mulai dari pakan, obat-obatan, yang lebih banyak berada dari negara centrum, telah menciptakan hubungan harmonis dengan para pengusaha tambak sebagaimana centrum dari fereferi desa. Harmonisasi sedemikian menciptakan tata hubungan yang disharmonis antar feriferi dari fereferi atau masyarakat desa dengan centrum dari fereferi pengusaha tambak luas).

Apabila kerangka teoritik sedemikian benar adanya, maka masalah pertanahan tambak udang adalah merupakan masalah yang rawan dilihat dari kerangka hubungan ketergantungan. Sebab reliatas demikian akan menimbulkan apa yang di dalam kerangka Samir Amin disebut dengan gejala marginalisasi massa yaitu, munculnya proletarisasi petani di pedesaan dan pengangguran terbuka.¹⁹

Sejauh mana ketergantungan itu akan menciptakan tata hubungan yang lebih menekan kehidupan petani miskin, adalah merupakan studi yang layak untuk dilakukann secara lebih dalam lagi. Masalahnya akan menyangkut pada persoalan siapakah yang mendapat tapa dan jumlah yang berapa, sebagaimana pernah dicanangkan oleh Dudley Seers ketika dia mengemukakan tentang makna pembangunan.²⁰

Masalah pembangunan dalam konteks yang dimaksud oleh Dudley Seers adalah soal distribusi hasil = hasil kekayaan, dan kekuaan tradisional untuk melakukan redistributif dari kekayaan yang berakar dlam moral ekonomi para petani ini yang kini semakin pudar, ketika modernisasi mulai melanda kehidupan mereka.

¹⁹ Samir Amin, *Accumulation on a Wold Scale, ACritique of The Theory of Underdevelopment*, New York, Monthly Reviiw Press, 1974

²⁰ Dudley Sears, *Makna Pembangunan*, Juwono Sudarsono (Ed) *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Gramedia Jakarta 1976



Segenap Keluarga Besar Universitas Muhammadiyah Malang mengucapkan Selamat atas suksesnya Muk-tamar Muham-madiyah ke-42, 15 - 20 Desember 1990 di Yogyakarta

